



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan  
website: <http://mores.stkipasundan.ac.id/index.php>  
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 4(1),  
23-32

---

## PENGEMBANGAN CIVIC DISPOSITION SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMP IT MANBAUL HIKMAH

**Heni Heryani, Ahmad Fadel**

Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi  
Delbay65@gmail.com

Naskah diterima : 11 Desember 2021, Naskah direvisi : 22 Januari 2022, Naskah disetujui : 25 Februari 2022

---

---

### ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata yang didalamnya mencakup memahami menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan acuan untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta didik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan civic disposition pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan pembelajaran guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengembangkan Civic Disposition yaitu dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai kebutuhan guru untuk melaksanakan tugasnya. (2) Proses pelaksanaan pembelajaran dalam mengembangkan Civic Disposition, yaitu materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas guna mengembangkan civic disposition siswa. (3) Pengembangan Civic Disposition dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu untuk menanamkan tradisi-tradisi baik yang dilakukan sehari-hari secara tidak langsung menjadi karakter para peserta didik. Contohnya mengajarkan peserta didik agar selalu mengikuti upacara bendera setiap hari senin, selalu mentaati peraturan-peraturan sekolah.

**Kata Kunci :** Civic Disposition, Pembelajaran PKn, Pendidikan karakter.

### ABSTRACT

Citizenship Education (PKn) is an eye that includes understanding, living, and practicing in everyday life and making it a reference for developing character education values for students. The formulation of the problem in this research is how to plan, implement, and develop civic disposition in learning Citizenship Education (PKn). The research method uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques start from observation, interviews, and documentation studies. The results of the study show that (1) Citizenship Education (PKn) teacher learning planning in developing Civic Disposition is by making a Learning Implementation Plan (RPP) as a teacher's need to carry out their duties. (2) The process of implementing learning in developing Civic Disposition, namely learning materials, learning methods, learning media, learning resources, and learning evaluations that are applied in the classroom to develop students' civic disposition. (3) Development of Civic Disposition in learning Citizenship Education (Civics), namely to instill good traditions that are carried out every day indirectly become the character of the students. For example, they teach students to follow the flag ceremony every Monday and obey school rules.

**Keywords:** Character Education Civic Disposition, Civics Learning.

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan mengacu pada berbagai macam aktivitas, mulai dari yang sifatnya produktif-material sampai kreatif-spiritual, mulai dari proses peningkatan kemampuan teknis (*skill*) sampai pada pembentukan kepribadian yang kokoh dan integral. Sebuah kegiatan yang mampu mengembangkan karakter anggotanya. Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*To be Good and Smart Citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebinnekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.

Bagi Indonesia, karakter warga negara akan memiliki kekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut, yakni Pancasila, dan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, ialah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) memegang peran yang amat sentral dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa. PKn dalam menghadapi era globalisasi hendaknya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*). Di antara aspek-aspek *civic competences* tersebut meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civicskill*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) sehingga dapat menumbuhkan karakter warga negara yang baik (Branson, 1999; Fauzi, Supriatna, & Santosa, 2020). Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi Serta menanamkan nilai karakter kepada siswa sehingga dapat menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berikir kritis dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Branson, 1999).

Di SMP IT Manbaul Hikmah berbagai macam perilaku menyimpang sering dilakukan oleh peserta didik, diantaranya adalah terjadinya perkelahian antar pelajar, bolos sekolah, membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Dengan adanya perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penerus bangsa menandakan bahwa peserta didik yang

diharapkan sebagai penerus bangsa mampu menjadi warga negara yang baik, yang memiliki karakter kewarganegaraan yang baik justru menyimpang dari nilai-nilai moral bangsa kita.

Masih banyak peserta didik yang tidak taat terhadap aturan-aturan yang ada, serta memiliki sikap-sikap dan karakter yang tidak sesuai dengan bangsa kita seperti kurang sopannya peserta didik terhadap yang lebih tua, kurang memiliki tanggung jawab pada diri peserta didik dan lain-lain. Terkait dengan peran pendidikan tersebut, tentunya sekolah yang menjadi tempat atau wadah untuk untuk mengembangkan atau membangun *civic disposition* siswa melalui pembudayaan karakter di lingkungannya. Sebuah budaya menggambarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya tanpa merasakan beban sedikitpun untuk melaksanakannya. Oleh karena itu dalam merancang budaya sekolah harus diperhatikan komponen-komponen yang berada dalam lingkungan sekolah agar dalam proses pendidikan tidak dirasakan sebagai beban.

Dari fokus pembahasan yang telah penulis ungkapkan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan *Civic Disposition* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diterapkan.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Untuk mengetahui pengembangan *civic disposition* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP IT Manbaul Hikmah Bekasi?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP IT Manbaul Hikmah Bekasi?
3. Bagaimana pengembangan *Civic Disposition* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP IT Manbaul Hikmah Bekasi?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Dalam penelitian kualitatif peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen,

sedangkan kebenaran data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Gunawan, Bandarsyah, & Fauzi, 2018; Sudarwan, 2002). Seperti yang dinyatakan oleh Moleong (2000), metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di SMP IT Manbaul Hikmah Bekasi yang berlokasi di Jl. Keramik Rt 02/02 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Sehubungan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif maka penelitian ini tidak ditentukan batas waktu secara jelas sampai peneliti memperoleh pemahaman yang benar-benar mendalam tentang objek yang diteliti, namun karena berbagai pertimbangan dan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka penelitian

ini dapat diakhiri dan dibuat laporannya, jika dianggap telah mencapai data dan analisis data sesuai dengan rancangan.

## KAJIAN KONSEP

### 1 Pengertian Pembelajaran

Definisi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai suatu proses oleh guru atau tenaga didik untuk membantu murid atau peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Arti pembelajaran yang lain adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu tertentu dan karena adanya usaha.

Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi kreativitas pengajar, pembelajaran yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan mengajar yang mampu memfasilitasi akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Desain pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah dengan kreativitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. Trianto (2010) dalam windiani (2016) menyatakan bahwa, Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskna. Pembelajaran secara simple dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks yaitu usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

## 2 Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan atau *Civic Education* adalah pendidikan atau pengajaran untuk mengembangkan kesadaran akan dirinya sebagai warga negara, dengan hak-hak dan berbagai tanggung jawabnya dalam diri peserta didik. Di Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan yang dikenal adalah pendidikan atau pengajaran “budi pekerti” yang menanamkan dalam peserta didik asas-asas moral, etika dan etiket yang melandasi sikap dan tingkah laku dalam pergaulan kehidupan keluarga, komunitas, dan masyarakatnya (Widiastono dalam Rini, 2013).

Budimansyah dan Suryadi (2008), menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor *Value Based Education*. PKn secara umum dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Guru dalam proses pembelajaran hanya menuntut kemampuan kognitif siswa saja. Hal ini ditegaskan oleh Sanjaya (2006) bahwa proses pembelajaran siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan proses pembelajaran di kelas diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi, tanpa dituntut untuk memahami informasi yang di ingatnya sehingga siswa kaya akan ilmu tetapi kurang dalam implementasinya. Secara garis besar, peran pembelajaran PKn ini diupayakan agar dapat mempersiapkan peserta didik memiliki kepribadian yang

mantap, yaitu membantu peserta didik agar memiliki sikap menghormati dan tenggang rasa terhadap sesama, karena pada pembelajaran PKn diberikan nilai-nilai bagaimana bertingkah laku yang baik yang sesuai dengan Pancasila.

Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, mengatur bahwa tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis, untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pembelajaran PKn, ada aspek-aspek yang saling berkaitan diantara satu dengan yang lain dalam ruang lingkupnya. Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2005 tentang ruang lingkup pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai standar nasional yang termuat dalam standar isi, mengemukakan bahwa

ruang lingkup mata pelajaran PKn sebagai berikut (Wahab & Sapriya, 2011):

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun, bangsa sebagai bangsa Indonesia, dan partisipasi dalam bela negara.
- b. Norma, hukum, dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- c. Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi hak dan kewajiban anak dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong dan persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa, kecamatan daerah, dan pusat.
- g. Kedudukan Pancasila, meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, pengalaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- h. Globalisasi, meliputi politik luar negeri Indonesia di era globalisasi dan dampak globalisasi.

Sesuai dengan pernyataan diatas, Azra (2015) juga mengatakan bahwa, terdapat tiga kompetensi dasar atau sering disebut kompetensi minimal dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu:

- a. Kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), yaitu kemampuan dan kecakapan siswa untuk menjelaskan ruang lingkup materi pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).
- b. Kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), yaitu kemampuan

dan kecakapan warga negara yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara, antara lain komitmen menjadikan Pancasila dan demokrasi sebagai prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa di Indonesia, menjunjung kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM serta memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi dilingkungannya.

- c. Kompetensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan public, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan, maupun kemampuan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya.

### 3. Pengertian Civic Disposition

Pentingnya watak kewarganegaraan ini jarang sekali ditegaskan. Karakter publik dan privat yang mendasari demokrasi, dalam jangka panjang, mungkin lebih merupakan dampak dari pengetahuan atau kecakapan yang dikuasai warga negara. Berdasarkan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 dalam Winarno (2014:191) tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), kita bisa mengidentifikasi sejumlah kompetensi kewarganegaraan dalam dimensi *civic disposition*, untuk SMP. Dalam dimensi karakter kewarganegaraan, peserta didik diharapkan untuk,

- a. Menghargai makna nilai-nilai kejuangan bangsa.
- b. Menghargai keputusan bersama.
- c. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Menghargai perbedaan dan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat dengan bertanggung jawab.
- e. Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- f. Menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap dampak globalisasi.

sebagian sus-sistem pembelajaran yang terdiri dari atau satu sama yang lain saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

Hal penting yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran adalah penjabaran tujuan yang disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan. (Kurniawati 2009) menyatakan, bahwa perencanaan program pembelajaran merupakan suatu penetapan yang memuat komponen-komponen pembelajaran secara sistematis. Analisis sistematis merupakan proses perkembangan pendidikan agar lebih efektif dan efisien disusun secara logis, rasional, sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah, dan daerah (masyarakat). (Kurniawati 2009) menyatakan, bahwa perencanaan program pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan program jangka pendek untuk memperkirakan suatu proyeksi tentang suatu yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1 Perencanaan Pembelajaran**

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun untuk kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Perencanaan merupakan kegiatan kurikulum sekolah kedalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. RPP dapat berupa perencanaan untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan mingguan, bahkan rancangan untuk kegiatan tahunan sesuai dengan tujuan kurikulum yang hendak dicapai. Prastowo (2017) mengatakan bahwa isi dari sebuah RPP itu bisa terdiri dari tujuan khusus yang spesifik, prosedur kegiatan belajar mengajar, materi pelajaran, waktu yang diperlukan sampai pada bentuk evaluasi yang akan digunakan. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan salah satu persiapan tertulis yang disusun oleh guru sebelum guru melakukan kegiatan pembelajaran untuk setiap kali pertemuan atau tatap muka. Perencanaan proses pembelajaran meliputi Silabus. Silabus merupakan

Selanjutnya Permendiknas No. 14 Tahun 2007 menyatakan, Rencana kegiatan harian (RKH) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam Silabus. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu upaya merumuskan perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah, siswa maupun daerah.

### **2 Pelaksanaan Pembelajaran**

dominan pada penguasaan materi yang tidak mengembangkan nilai-nilai

karakter PKn. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan justru mengarah pada karakter pasif yaitu siswa lebih diarahkan pada sikap menghargai orang lain dengan mendengarkan saja, terbiasa tidak bertanya, dan patuh terhadap perintah seperti penugasan yang dirikan oleh guru. Metode yang masih sangat sederhana dan bersifat indoktrinasi seperti ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas yang hanya menggunakan sumber belajar pada buku teks atau hanya buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

Menggunakan metode ceramah tidak dapat menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, namun penggunaan metode tanya jawab masih bisa memunculkan nilai-nilai karakter pada pembelajaran seperti karakter berpikir logis, kritis, kreatif, cinta ilmu dan ingin tahu, sedangkan pemberian tugas pada siswa dapat mengembangkan nilai karakter tanggung jawab pada siswa. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran adalah saya menemukan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan menyediakan media pembelajaran. Di dalam kelas tersedia sebuah peta, globe, gambar-gambar para pahlawan, dan lain-lain. Selain itu dalam proses pembelajaran, guru Pendidikan Kewarganegaraan juga memanfaatkan sebuah media diluar kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler, masyarakat yang sedang beraktivitas, fenomena-fenomena yang terjadi diluar, dan lain-lain.

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ada komponen pembelajaran yang juga memberikan pengaruh dalam pengembangan *civic disposition* siswa, yaitu materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar

dan evaluasi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran (Djamarah dan Zaim, 2002) sehingga materi pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran tanpa materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung. Materi pembelajaran dapat berupa fakta, konsep, prinsip maupun prosedur. Materi pembelajaran hendaknya lebih menitikberatkan pada pembinaan watak kewarganegaraan, pemahaman dan penghayatan nilai serta pengamalan Pancasila dan UUD 19 sebagai filsafat dan pandangan hidup bangsa, pembinaan siswa untuk melihat kenyataan, fokus belajar pada konsep yang benar menurut dan sesuai dengan Pancasila.

### 3. Pengembangan *Civic Disposition*

Dalam lembaga pendidikan formal, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membangun karakter peserta didik. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakal sehat, berilmu, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan hal ini, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut.

Guru Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter warga negara yang baik. Salah satu peran dan fungsi yang dimiliki oleh guru yaitu kemampuan mendidik. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang

tidak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Karena guru Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya sebagai pemberi materi di kelas saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan watak dan karakter siswa. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sangat penting di sekolah karena memfokuskan pelajarannya pada pembentukan karakter warga negara yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Berbagai upaya telah dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Manbaul Hikmah Bekasi dalam meningkatkan *Civic Dispositions* siswa. *Civic Dispositions* pada dasarnya berkaitan erat dengan karakter siswa dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat atau warga negara.

Watak kewarganegaraan (*Civic disposition*) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi.

Namun pendidikan karakter yang ada di lembaga pendidikan, khususnya di SMP IT Manbaul Hikmah Bekasi tidak hanya mengajarkan teori-teori dalam pembelajaran saja, tetapi menanamkan tradisi-tradisi baik yang dilakukan sehari-hari secara tidak langsung menjadi karakter para peserta didik. Contohnya mengajarkan peserta didik agar selalu mengikuti upacara bendera setiap hari

senin, melatih siswa untuk aktif dan berorganisasi, selalu mentaati peraturan-peraturan sekolah, dan lain-lain. Setiap guru sudah menggunakan perpaduan antara penilaian sikap perilaku, visi dan misi, dengan kurikulum 2013 yang ada di sekolah SMP IT Manbaul Hikmah Bekasi. Maka dari itu sedikit demi sedikit pengembangan pendidikan karakter pada peserta didik di sekolah SMP IT Manbaul Hikmah Bekasi dapat terlaksana dan dapat diamankan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat saya simpulkan bahwa.

1. Perencanaan pembelajaran guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengembangkan *Civic Disposition* yaitu dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai kebutuhan guru untuk melaksanakan tugasnya. Perencanaan merupakan kegiatan kurikulum sekolah kedalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. RPP dapat berupa perencanaan untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan mingguan, bahkan rancangan untuk kegiatan tahunan sesuai dengan tujuan kurikulum yang hendak dicapai.
2. Proses pelaksanaan pembelajaran guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengembangkan *Civic Disposition* yaitu dengan adanya komponen pembelajaran yang juga memberikan pengaruh dalam pengembangan *civic disposition* siswa, yaitu materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar dan

evaluasi pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di dalam kelas guna mengembangkan *civic disposition* siswa.

3. *Civic Disposition* berfungsi untuk menanamkan tradisi-tradisi baik yang dilakukan sehari-hari secara tidak langsung menjadi karakter para peserta didik. Contohnya mengajarkan peserta didik agar selalu mengikuti upacara bendera setiap hari senin, melatih siswa untuk aktif dan berorganisasi, selalu mentaati peraturan-peraturan sekolah, dan lain-lain. Supaya peserta didik dapat berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

## REFERENSI

- Azra, A. (2015). *Pancasila demokrasi dan pencegahan korupsi*. Prenamedia Group.
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan masyarakat multikultural*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Branson, M.S. (Eds). (1999). *Belajar civic education dari amerika*. (Terjemahan Syarifudin, dkk). Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF).
- Djamarah, S. B & Zaim, A. (2002). *Strategi belajar mengajar*. Rineka Cipta.
- Fauzi, W. I., Supriatna, N., & Santosa, A.B. (2020). *Belajar sejarah melalui sastra: teori dan aplikasi pembelajaran*. UPI Press.
- Gunawan, R., Bandarsyah, D., & Fauzi, W. I. (2018, November). The Formation of student character through the novel history of pramoedy a ananta toer in history learning. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (pp. 383-387). Atlantis Press.
- Kurniawati, D. E. (2009). Pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra indonesia dengan pendekatan tematis. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas.
- Moleong, L.J. (2000) *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya,
- Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007*.
- Prastowo, A. (2017). *Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (rpp) tematik terpadu*. Kencana.
- Sanjaya, W. (2006). *Strategi pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarwan, D, (2002). *Menjadi peneliti kualitatif r a n c a n g a n metodologi, presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan penelitian pemula bidang ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora*. Remaja Rosdakarya
- Wahab, A, .A, dan Sapriya. (2011). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Windiani, R. (2016), *Penggunaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan sikap percaya diri dan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman kenampakan alam dalam pembelajaran ipa*. Hal 15-51.
- Yuliana, R. (2013). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di smp negeri 3 gringsing batang. *Skripsi*.